

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ditinjau dari tahapan prosedur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan di Desa Pa'Kemut Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang telah dilaksanakan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah beserta petunjuk teknisnya, namun dalam proses ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk dalam bentuk uang tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah karena ganti kerugian tidak sesuai dan merugikan pihak yang terkena dampak, diakibatkan para penyelenggara pengadaan tanah tidak memberikan sepenuhnya kepada pihak pemegang hak atas tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada panita pengadaan tanah pembangunan waduk di Desa Pa' Kemut bahwa dalam hal menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian harus berdasarkan musyawarah karena pemegang hak atas tanah mempunyai hak untuk memilih bentuk ganti kerugian uang dan waktu pelaksanaan pemberian ganti kerugian secara pasti sehingga dapat diketahui oleh pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan dalam pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurahman H,1996, *pencabutan Hak-hak atas tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, PT. Citra Aditya,Bandung
- Andrian Sutedi, 2008, *Implementasi Kepentingan Umum dalam Pengadaan tanah Untuk Pembangunan*, sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, 2003,*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan penjelasannya*,Edisi Revisi,Cetakan ke-9, Jakarta
- Bernhard Limbong,2011, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*,Margaretha Pustaka,Jakarta
- Djoni Sumardi Gizali, 2018, *Hukum Pengadaan Tanah*, UII Press, Yogyakarta
- Mukdakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Askara, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-ungan Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum